



Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B

Fadhillah Subekti*, Ririh Sri Harjanti, Aryanto

Politeknik Harapan Bersama, Tegal, Indonesia

*Alamat e-mail corresponding author : fadhillahsubekti1602@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Tanggal Submit 2 Januari 2024

Tanggal revisi 20 Maret 2024

Tanggal Accepted 29 Maret 2024

Key words:

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah

DOI:

10.36805/akuntansi.v9i1.6140

ABSTRACT

Government Accounting Standards are accounting principles that are applied in preparing government financial reports in transparent and accountable manner. Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B is one of the accounting entities under Mahkamah Agung republic Indonesia which is obliged to carry out accounting and accountability reports on the implementation of state revenue and expenditure budget. The purpose of this research was to determine the presentation of financial statement based on PP No. 71 of 2010 at the Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B. Methods of collecting data use in this research was observation, interview, and study of literature. The analysis method used is descriptive qualitative method. The results of the research show that the components of the financial reports of the Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B, namely Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Changes of Equity Report, and Notes to Financial Statement has been appropriate based on PP No. 71 of 2010. Nonetheless, there are still posts in the Budget Realization Report that has not been included.

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah secara transparansi dan akuntabilitas. Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B merupakan salah satu entitas akuntansi dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa komponen laporan keuangan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Namun, masih ada pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran yang belum dicantumkan.

Open access under Creative
Common Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA)



1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan yang baik dapat dilihat dengan mencermati tata kelola pemerintah. Dalam sistem manajemen organisasi, tata kelola yang baik bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, ekonomis serta produktivitas dalam manajemen sumber daya ekonomi dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas guna mencapai tujuan organisasi. Pemerintah wajib memiliki sistem manajemen, prosedur serta kebijakan yang mumpuni dengan adanya bantuan dari manajemen personal. Sekarang ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan Negara yang transparan serta akuntabel (Hartati et al. 2020).

Pedoman akuntansi yang diimplementasikan pada proses penyusunan serta pemaparan laporan keuangan pemerintah secara transparan serta akuntabel dalam penyelenggaraan akuntansi publik dan peningkatan mutu dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ialah pedoman dengan ketentuan yang berbentuk format yang menetapkan tata cara penyusunan dan pemaparan laporan keuangan dengan baik dan benar dalam proses akuntansi dan pengolahan dana (Maryono and Fauziyah 2021). Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan mutu laporan keuangannya dengan SAP sebagai kualifikasi dengan kekuatan hukum. Penyusunan standar ditugaskan pemerintah kepada KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sebagai komite standar independent dimana pembentukannya diresmikan melalui keputusan presiden. UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara pada Pasal 36 Ayat (1) memerintahkan pengaplikasian basis akrual pada penilaian serta pernyataan penghasilan serta belanja agar dilakukan paling lambat lima tahun. Dalam rangka penerapan perintah tersebut, SAP sudah dirumuskan oleh KSAP. Basis Akrual dibentuk berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005.

Penetapan SAP berbasis akrual kini berlandaskan hukum dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Oleh karena itu pemerintah wajib mengaplikasikan SAP berbasis akrual sesegera mungkin. Sistem akuntansi Indonesia dalam konfirmasi transaksi keuangan oleh pemerintah pada awalnya berbasis kas menuju akrual, lalu berubah sejak diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010 menjadi berbasis akrual penuh. Perubahan mendasar ini tidak hanya mengakibatkan diresmikannya paket UU keuangan negara, tetapi dapat juga menyajikan visualisasi menyeluruh situasi keuangan, informasi nyata mengenai hak serta kewajiban, juga membantu evaluasi kinerja.

SAP berbasis akrual yang diaplikasikan pemerintah membenarkan dalam laporan keuangan terdapat pendapatan, asset, beban, ekuitas, serta utang. Hal tersebut sesuai dengan isi PP No 71 Tahun 2010 dimana Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual ialah SAP yang membenarkan dimuatnya pendapatan, asset, beban, ekuitas, serta liabilitas berbasis akrual dalam laporan keuangan serta berdasarkan basis yang ditentukan pada APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ataupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dicatat pendapatan, pembiayaan, serta belanja dalam laporan pelaksanaan anggaran. Dalam peraturan yang sama, ditetapkan bahwa mulai tahun anggaran 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan wajib diimplementasi pada penataan laporan keuangan. Berarti, laporan keuangan tahunan 2010 musti dipaparkan sesuai SAP berbasis akrual. Dengan demikian, manfaatnya akan dirasakan oleh pengguna informasi keuangan secara general dalam pemenuhan kebutuhannya akan informasi dengan kualitas terbaik serta bagi pengguna laporan keuangan dalam melakukan penilaian akuntabilitas serta penentuan keputusan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam laporan keuangan dengan basis akrual, menurut PP No. 71 Tahun 2010 dibentuk dari tujuh bagian, bagian-bagian tersebut ialah Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuh komponen tersebut wajib dibuat oleh setiap entitas pelaporan.

Beberapa masalah sering muncul adalah dengan adanya penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 terutama pada penyampaian pos atau item pada laporan keuangan pada instansi pemerintah. Oleh sebab itu maka diharapkan instansi pemerintah mampu menyusun laporan keuangan menggunakan basis akuntansi yang berdasar pada PP No. 71 Tahun 2010 yaitu PSAP No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Sanosi 2021). Sedangkan menurut hasil penelitian (Prayogo et al. 2023) menjelaskan bahwa penerapan PP No 71 Tahun 2023 pada Dinas tertentu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah sesuai namun masih menemui beberapa kendala diantaranya adalah masih memerlukannya dukungan sumber daya manusia yang professional dalam pengelolaan

keuangan. Selanjutnya dapat diterangkan dari hasil penelitian (Mumu, Kalangi, and Kapojos Peter M 2023) bahwa Kantor Kecamatan tertentu pada Kabupaten Minahasa sudah menyusun Laporan Keuangan dengan berdasar pada PP No 71 Tahun 2023, namun masih terdapat pos yang kurang untuk LRA (Laporan Realisasi Anggaran) yaitu pos transfer serta pembiayaan diharapkan dilengkapi supaya sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1B merupakan entitas di bawah Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk melaksanakan akuntansi serta pelaporan pertanggung jawaban atas realisasi APBN. Pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B terdapat dua jenis laporan keuangan yaitu laporan keuangan dengan kode 01 untuk Eselon I Badan Urusan Administrasi diikuti kode satuan kerja 400565 milik PN Slawi Kelas I B. Jenis kedua yaitu laporan keuangan dengan kode 03 untuk Eselon I Dirjen Badan Peradilan Umum diikuti kode satuan kerja 400566 milik PN Slawi Kelas I B. Berdasarkan hasil observasi pada Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B yang dilaksanakan pada tahun 2023 bahwa penyajian laporan keuangan semester II tahun 2021 Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B yang berdasar pada PP No. 71 Tahun 2010 dalam penyajian bagian maupun pos yang tertera pada laporan keuangan belum teridentifikasi kesesuaiannya. Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B sebagai instansi pemerintah disyaratkan bahwa instansi pemerintah wajib memuat tujuh unsur dalam laporan keuangannya, yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B hanya memaparkan lima unsur yaitu Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan dalam laporan keuangannya. Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B tidak Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas seperti apa yang tertera pada komponen laporan keuangan pada PP No.71 Tahun 2010.

Berlatar belakang dari penjelasan di atas, sehingga dilakukan penelitian untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Sasaran utama peninjauan akan topik ini ialah untuk meneliti keselarasan antara penyusunan komponen laporan keuangan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B dengan ketentuan yang termuat pada PP No. 71 Tahun 2010. Dari segi teoritis, penelitian ini memiliki manfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penyusunan serta penyajian laporan keuangan pada lingkup akuntansi pemerintahan. Harapannya laporan keuangan yang dirumuskan mampu menjadi sumber informasi yang berguna secara langsung dan berkaitan tentang semua posisi keuangan dan segala bentuk transaksi entitas pelaporan, sehingga akan tercipta transparansi laporan keuangan bagi para pemegang kepentingan dan masyarakat luas.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Akuntansi

AICPA(American Institute of Ceritifed Public Accountant) dalam (Zamzami & Nusa, 2017) Menjelaskan bahwa akuntansi ialah seni dalam mencatat, mengklasifikasi, serta meringkas transaksi serta peristiwa yang berhubungan dengan keuangan dan menerjemahkan hasilnya melalui cara yang signifikan serta dijelaskan dalam nilai uang. Pengertian lain akuntansi sesuai *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) pada (Zamzami & Nusa, 2017) ialah tahapan penentu, pengukur, dan pengomunikasian informasi ekonomi atas kemungkinan diambilnya sebuah keputusan oleh pengguna informasi berdasarkan informasi tersebut. Akuntansi merupakan kegiatan jasa, menurut *Accounting Principle Board*(APB) Statement No. 4 dalam (Zamzami & Nusa, 2017) dimana fungsinya sebagai penyedia informasi kualitatif dengan sifat keuangan mengenai entitas ekonomi dengan tujuan dapat bermanfaat bagi penentuan keputusan ekonomi. Sedangkan Kieso dalam (Rombebunga et al., 2018 : 296) menjelaskan bahwa Akuntansi ialah sebuah tanda pengenalan, informasi komunikasi keuangan, dan ukuran atas entitas ekonomi bagi pihak yang terkait. Maka, dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu

sendiri dapat diartikan sebagai tahapan inventarisasi, pengklasifikasian, pengikhtisaran yang membuahakan fakta atas ekonomi yang akan diserahkan kepada pihak pemakainya.

2.2. *Pengertian Akuntansi Pemerintah*

Kegiatan memberikan jasa penyediaan informasi keuangan pemerintah merupakan pengertian Akuntansi pemerintahan dimana informasi tersebut didasari proses pencatatan, penggolongan, penguraian transaksi pemerintah dan penjelasan atas informasi keuangan. Berdasarkan pada bentuk kelembagaan dan ragam ukuran pemakai informasi akuntansi, maka sektor-sektor akuntansi seluruhnya dikalsifikasi menjadi tiga sektor primer, antara lain akuntansi nasional, akuntansi perusahaan, serta akuntansi pemerintahan (Sadat 2020). Pengertian lain dari akuntansi pemerintah yang di utarakan (Sujarweni, 2015) pada bukunya ialah, akuntansi yang berkaitan terhadap sektor keuangan negara, mulai dari anggaran, realisasi hingga pelaporan, didalamnya mencakup seluruh dampak yang disebabkan. Sejalan dengan Sujarweni, Barus (2021 : 63) dalam bukunya menjelaskan Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu akuntansi yang melakukan proses transaksi ekonomi negara yang prosesnya dimulai dengan anggaran. realisasi hingga pelaporan pada tingkat pusat juga tingkat daerah.

2.3. *Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah*

PP No. 71 Tahun 2010 menentukan bahwa dalam penataan serta pemaparan laporan keuangan pemerintah musti diimplementasikan pedoman-pedoman akuntansi yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa SAP adalah kualifikasi dengan kekuatan hukum yang diupayakan pemerintah untuk menjadikan laporan keuangan seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia berkualitas baik. Seluruh laporan keuangan pemerintah termasuk LKPD(Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) serta LKPP(Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) harus disusun serta disajikan dengan mengimplementasi SAP yang berupa pedoman-pedoman akuntansi dalam meningkatkan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menghasilkan LKPP dan LKPD yang berkualitas (Dharmawati, Inthanah, and Trisila 2018). Menurut Wijaya (dalam Rombbunga et al., 2018 : 296) SAP ialah kualifikasi minimum akuntansi yang lebih dulu ada untuk mengendalikan akuntansi pada sektor publik. Dengan diimplementasikannya ketentuan ini, laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi memiliki manfaat sebagai sarana komunikasi antara instansi dengan stakeholder.

2.4. *Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah*

Manfaat yang dapat dirasakan dari SAP adalah agar pelaporan keuangan mampu menyampaikan informasi keuangan yang lengkap, terbuka serta jujur bagi pemegang kepentingan serta masyarakat. Dalam hal ini cakupan manajemen harus mampu memudahkan penggunaanya dalam merencanakan, mengelola, serta mengontrol modal, beban, juga ekuitas keuangan pemerintah (Rombbunga et al. 2018)

2.5. *Laporan Keuangan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010*

Rangkuman info aktual atas posisi keuangan entitas pelaporan serta segala bentuk transaksi keuangan pada satu kurun waktu, merupakan definisi ideal dari laporan keuangan. Dengan laporan keuangan kita tahu berapa nilai sumber daya keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas operasional pemerintah, menilai entitas pelaporan atas efektivitas serta efisiensinya, mengevaluasi kondisi keuangan, dan mendukung penentuan kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan.

2.6. *Komponen Laporan Keuangan*

Selaras pada aturan PP No. 71 Tahun 2010 yang memaparkan jika pembentukan laporan keuangan idealnya menyertakan tujuh bagian yakni, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

2.7. Penelitian yang Telah Dilakukan Sebelumnya

Tabel 1

Penelitian yang Telah Dilakukan Sebelumnya

No	PENULIS (TAHUN TERBIT)	JUDUL	METODE	HASIL
1.	Andi Elkana Barus (2021)	“Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo”	Deskriptif, Kompratif	SAP yang penggunaanya ditentukan PP No. 71 Tahun 2010 belum diimplementasikan DisHub Kabupaten Karo dengan menyeluruh dalam penyusunan laporan keuangannya.
2.	Maryono, Fauziah Lamaya (2021)	“Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Di Pengadilan Tinggi Agama Kupang”	Deskriptif Kualitatif	Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah membuat laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP serta PerMen Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015
3.	Anastasya A. Lasabuda, Victorina Z. Tirayoh, Jenny Morasa (2020)	“Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara”	Deskriptif Kualitatif	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memaparkan laporan keuangan menurut ketentuan pada PP No.71 Tahun 2010 atas pengaplikasian SAP dengan basis akrual.
4.	Frenly Rombebunga, Novi Swandari Budiarso, David P.E Saerang (2018)	“Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bitung Berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010”	Metode deskriptif eksploratif	Dinas PU Kota Bitung sudah mematuhi ketentuan PP No.71 Tahun 2010 dengan mengimplementasikan SAP walaupun belum maksimal, penyebabnya adalah poin-poin belum komplit seperti tidak adanya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih di laporan keuangan.
5.	Gita Desipradani, Zeni Rusmawati (2017)	“Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010”	Deskriptif Kualitatif	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan sudah mematuhi ketentuan pada PP No. 71 Tahun 2010.

3. Metode Penelitian

Metode analisis data deskriptif kualitatif dipilih sebagai metode yang dipakai pada peninjauan ini. Metode deskriptif kualitatif adalah pewujudan analisis dengan menggambarkan realitas atau kondisi-kondisi sebuah objek berupa ikhtisar kalimat dengan dasar informasi dari para pihak yang berkaitan dengan topik penelitian secara langsung. Proses yang dilaksanakan dalam menganalisa data penelitian ialah, mengumpulkan, mereduksi dan menganalisis data,

serta menarik simpulan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PN Slawi Kelas I B tepatnya di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 99, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wawancara, observasi, serta studi Pustaka dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang paling sesuai.

4. Hasil dan Pembahasan

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada PN Slawi Kelas I B terbagi menjadi 5 (lima) komponen Laporan Keuangan, antara lain :

4.1. *Penyajian Laporan Realisasi Anggaran*

Pada komponen ini nilai anggaran dibandingkan dengan realisasinya di digambarkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dimana memuat komponen-komponen pendapatan serta belanja dalam jangka waktu periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021. Dari laporan tersebut dicantumkan besaran nilai Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2021 yakni Rp 361.907.455, dan Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yakni Rp 29.596.493.582.

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 pada PN Slawi Kelas I B

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI TERHADAP ANGGARAN (%)
PENDAPATAN			
Pendapatan	12.000.000	361.907.455	3.015,90
Jumlah Pendapatan	12.000.000	361.907.455	3.015,90
BELANJA			
Belanja Pegawai	3.246.837.000	3.197.657.686	98.49
Belanja Barang	1.203.984.000	1.115.152.399	92.62
Belanja Modal	25.330.750.000	25.283.683.497	99.81
Jumlah Belanja	29.781.571.000	29.596.493.582	99.38

Sumber : PN Slawi Kelas I B, 2023.

4.2. *Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih*

Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B dalam menyusun Laporan Keuangan tak membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Tidak disertakannya bagian tersebut disebabkan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B bukan merupakan Bendahara Umum Daerah ataupun Bendahara Umum Negara maka tidak dibuat laporan keuangan konsolidasi.

4.3. *Penyajian Neraca*

Posisi keuangan entitas atas aset, ekuitas, serta kewajiban PN Slawi Kelas I B pada 31 Desember 2021 dipaparkan dalam Neraca. Dalam laporan tersebut tertera nilai Aset per 31 Desember 2021 senilai Rp 45.926.711.252. Kemudian per 31 Desember 2021 Nilai Kewajiban PN Slawi Kelas I B sebanyak Rp 35.706.575. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebanyak Rp 45.891.004.677

Tabel 3
Neraca TA 2021 pada PN Slawi Kelas I B

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH (Rp)
1	2
ASET	
Aset Lancar	
Kas pada Bendahara Pengeluaran	0
Belanja dibayar di muka (prepaid)	0
Persediaan	3.181.200
Persediaan yang belum deregister	0

Total Aset Lancar	3.181.200
Aset Tetap	
Tanah	14.878.592.000
Peralatan dan Mesin	2.737.535.758
Gedung dan Bangunan	25.246.386.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	9.373.742
Konstruksi dalam pengerjaan	5.642.394.497
Akumulasi penyusutan aset tetap	-2.590.751.945
Total Aset Tetap	45.923.530.052
Piutang Tagihan(TP/TGR)	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan(TP/TGR)	0
Tagihan(TP/TGR) (Netto)	0
Total Piutang Jangka Panjang	0
Aset Lainnya	
Ast Tak Berwujud	4.895.000
Aset Lain-lain	172.289.318
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	-177.184.318
Total Aset Lainnya	0
TOTAL ASET	45.926.711.252
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Pada Pihak Ketiga	35.706.575
Pendapatan Diterima Dimuka	0
Pembayaran dimuka dari KPPN	0
Total Kewajiban Jangka Pendek	35.706.575
TOTAL KEWAJIBAN	35.706.575
EKUITAS	
Ekuitas	45.891.004.677
TOTAL EKUITAS	45.891.004.677
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	45.926.711.252

Sumber : PN Slawi Kelas I B, 2023.

4.4. Penyajian Laporan Operasional

Pada laporan ini disajikan komponen pendapatan, surplus/(defisit) operasional, beban, pos luar biasa, surplus/(defisit) aktivitas di luar operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa, serta surplus/(defisit)LO oleh PN Slawi Kelas I B atas keperluan penyajian yang wajar. Dalam Pos Kegiatan Operasional tersusun atar Penghasilan Bukan Pajak serta Beban. Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dibagi menjadi Penghasilan Pajak senilai Rp 0,00, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya senilai Rp 11.872.605, Pendapatan Hibah senilai Rp 0,00. Akun Beban terdiri dari Beban Pegawai senilai Rp 3.197.199.786, Beban Persediaan senilai Rp 43.153.350, Beban Barang dan Jasa senilai Rp. 599.253.385, Beban Pemeliharaan senilai Rp 422.675.228, Beban Perjalanan Dinas senilai Rp 59.603.016, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih senilai Rp 0,00 serta Beban Penyusutan serta Amortisasi senilai Rp 511.906.081. Maka hingga 31 Desember 2021 jumlah keseluruhan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah senilai Rp. 11.872.605,00 dan jumlah keseluruhan Beban senilai Rp. 4.833.789.846,00, dari angka yang tertera disimpulkan adanya defisit dari aktivitas operasional sebesar Rp.

(4.821.917.241,00). Defisit aktivitas non operasional senilai Rp. (1.136.548.190,00) serta pos luar biasa senilai Rp. 0,00 maka entitas pelaporan menanggung defisit senilai Rp. (5.958.465.431,00)

Tabel 4

Laporan Operasional TA 2021 pada PN Slawi Kelas I B

URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN NEGARA NON PAJAK	
Pendapatan Perpajakan	0
Pendapatan Negara Non Pajak Lainnya	11.872.605
Pendapatan Hibah	0
Total Pendapatan Negara Bukan Pajak	11.872.605
BEBAN	
Beban Pegawai	3.197.199.786
Beban Persediaan	43.153.350
Beban Barang serta Jasa	599.252.385
Beban Pemeliharaan	422.675.228
Beban Perjalanan Dinas	59.603.016
Beban Penyusutan Serta Amortisasi	511.906.081
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0
TOTAL BEBAN	4.833.789.846
SURPLUS/ (DEFISIT)KEGIATAN OPERASIONAL	-4.821.917.241
KEGIATAN DILUAR OPERASIONAL	
SURPLUS/ (DEFISIT)PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	304.695.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.486.583.040
Total Surplus/ (Defisit)Pelepasan Aset Non Lancar	-1.181.888.040
SURPLUS/ (DEFISIT)KEGIATAN DILUAR OPERASIONAL LAIN	
Pendapatan Kegiatan Diluar Operasional Lainnya	45.339.850
Beban Kegiatan Diluar Operasional Lainnya	0
Total Surplus/ (Defisit)Kegiatan Diluar Operasional Lainnya	45.339.850
SURPLUS/ (DEFISIT)KEGIATAN DILUAR OPERASIONAL	-1.136.548.190
POS LUAR BIASA	0
SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	-5.958.465.431

Sumber : PN Slawi Kelas I B, 2023.

4.5. Penyajian Laporan Arus Kas

Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B dalam menyusun Laporan Keuangannya tidak menyajikan Laporan Arus Kas, hal itu dikarenakan Pengadilan Negeri Slawi tidak memiliki fungsi Bendahara Umum Negara.

4.6. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi mengenai perbandingan ekuitas tahun pelaporan dan periode sebelumnya apakah terdapat kenaikan ataupun penurunan nilai disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Dari komponen ini diketahui pada tanggal 01 Januari 2021 jumlah Ekuitas PN Slawi Kelas I B senilai Rp. 22.614.693.981,00 dipotong defisit-LO senilai Rp. (5.958.465.431,00), lalu dijumlahkan dengan perbaikan senilai Rp. 0,00 yang mengurangi serta dijumlahkan terhadap transaksi antara entitas satu dengan yang lain senilai Rp. 29.234.776.127,00 sehingga didapatkan jumlah ekuitas per31 Desember 2021 senilai Rp.45.891.004.677,00.

Tabel 5
Laporan Perubahan Ekuitas TA 2021 pada PN Slawi Kelas I B

URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2
EKUITAS AWAL	22.614.693.981
SURPLUS/DEFISIT	-5.958.465.431
PERBAIKAN YANG MENAMBAH/MENGURANGI	0
EKUITAS	0
PENGARUH KUMULATIF PERUBAHAN	0
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Perbaikan Nilai Aset Tetap Tidak Revaluasi	0
Perbaikan Lainnya	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	29.234.776.127
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	23.276.310.696
EKUITAS AKHIR	45.891.004.677

Sumber : PN Slawi Kelas I B, 2023.

4.7. *Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan*

Rincian informasi terkait uraian/rincian/analisa nilai sebuah pos dalam laporan keuangan yang tertera di Laporan Operasional, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, serta Laporan Perubahan Ekuitas dipaparkan pada bagian ini.

4.8. *Hasil Pembahasan*

Kesesuaian laporan keuangan yang disusun Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Tahun Anggaran 2021 terhadap PP No. 71 Tahun 2010 dapat dibahas berbasis analisa data yang menghasilkan data, berikut adalah tabel kesesuaiannya :

Tabel 6
Perbandingan PP No. 71 Tahun 2010 dengan Laporan Keuangan TA 2021 PN Slawi Kelas I B

No	Komponen	PP Nomor 71 Tahun 2010	Hasil Penelitian	Hasil Analisis
1.	Laporan Realiasi Anggaran	Uraian sumber, distribusi serta pemanfaatan sumber daya keuangan dimana pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah menjadi pengelolanya pada satu masa pelaporan dipaparkan dalam komponen satu ini. Selain itu, penggambaran perhitungan anggaran dibandingkan pelaksanaannya pada satu tahun pelaporan harus tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran . Unsur-unsur yang harus disajikan LRA sekurang-kurangnya antara lain : a. Pendapatan-LRA b. Transfer c. Pembiayaan d. Belanja	Pada Tabel 2 menggambarkan disajikan informasi mengenai pos Pendapatan Lainnya dengan rincian Pendapatan Sewa Tanah, Bangunan serta Gedung, Pendapatan Penjualan Tanah, Bangunan serta Gedung, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Sebelumnya. Pos Belanja dengan rincian Belanja Barang, Belanja Pegawai, serta Belanja Modal. PN Slawi Kelas I B juga memaparkan perbandingan anggaran serta pelaksanaannya dalam satu periode pelaporan pada	Sudah sesuai.

		e. Surplus/(defisit)LRA f. Kelebihan atau kekurangan pembiayaan anggaran	Laporan Realisasi Anggaran PN Slawi Kelas I B.	
2.	Laporan Saldo Anggaran Lebih	Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan pos-pos : a. Saldo anggaran lebih awal b. Penggunaan saldo anggaran lebih c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya e. Saldo anggaran lebih akhir	Pengadilan Negeri Slawi tidak memiliki posisi sebagai Bendahara Umum/Daerah dan tidak membuat Laporan Keuangan Konsolidasi sehingga tidak menyajikan Laporan Saldo Anggaran Lebih.	Tidak disajikan dalam Laporan Keuangan milik Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.
3.	Neraca	Neraca memvisualisasikan kondisi keuangan entitas pelaporan tentang asset, ekuitas, serta kewajiban di suatu tanggal. Pada komponen ini, seluruh asset entitas pelaporan dikelompokkan atas aset lancar serta tak lancar lalu pengklasifikasian kewajiban pada kewajiban jangka pendek serta jangka panjang.	Pada Tabel 3 menggambarkan Neraca PN Slawi Kelas I B telah menyajikan informasi mengenai Aset yang digolongkan atas Aset Lancar berupa kas pada bendahara daerah, persediaan, persediaan yang perlu deregister, belanja dibayar dimuka (perpaid). Tanah, bangunan serta gedung, jalan, jaringan serta irigasi, alat-alat serta mesin, serta aset -aset tetap lain digolongkan sebagai Aset Tetap. Disajikan Kewajiban yang telah diklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek berupa pendapatan diterima dimuka, uang muka dari KPPN, utang pada pihak ketiga. Ekuitas juga disajikan dalam Neraca.	Sudah sesuai
4.	Laporan Operasional	Uraian sumber daya keuangan atas peningkatan ekuitas serta pemakaiannya yang diatur oleh pemerintah pada satu periode pelaporan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Bagian-bagian pada LO secara langsung ialah pendapatan-LO, transfer, beban, serta beberapa pos luar biasa.	Pada Tabel 4 menggambarkan Laporan Operasional Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B yang telah memaparkan informasi atas Kegiatan Operasional dan Kegiatan Diluar Operasional. Dalam Laporan Operasional terdapat unsur Pendapatan-LO, Transfer, Beban serta Pos Luar Biasa.	Sudah sesuai
5.	Laporan Arus Kas	Unsur yang terkandung dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas.	Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B bukan sebagai Bendahara Umum/Daerah sehingga tidak membuat	Tidak disajikan dalam Laporan

			Laporan Arus Kas dalam penyajian laporan keuangan.	Keuangan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B
6.	Laporan Perubahan Ekuitas	Pada komponen ini dipaparkan perbandingan nilai ekuitas pada periode pelaporan dan periode sebelumnya apakah ditemukan kenaikan atau penurunan. Pos yang sekurang-kurangnya harus disajikan dalam LPE ialah : a. Ekuitas awal. b. Surplus/defisit-LO dalam jangka waktu terkait. c. Perbaikan yang meningkatkan ataupun menurunkan ekuitas. d. Ekuitas akhir.	Pada Tabel 5 menggambarkan Laporan Perubahan Ekuitas Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B telah menyajikan informasi mengenai beberapa pos Laporan Perubahan Ekuitas berupa Ekuitas Awal, Perbaikan Yang Menambah/Mengurang, Surplus/Defisit, Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Dampak Kumulatif Perubahan, Kenaikan/Penurunan Ekuitas, Transaksi Antar Entitas, serta Ekuitas Akhir.	Sudah sesuai
7.	Catatan atas Laporan Keuangan	Pemaparan detail nilai yang tertera pada Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas disajikan dalam bagian ini. Dalam komponen ini dimuat juga informasi penggunaan kebijakan akuntansi dari entitas serta informasi lainnya yang sesuai SAP harus dan dianjurkan agar ditunjukkan, dan istilah-istilah yang dibutuhkan agar berhasil menyajikan laporan keuangan dengan wajar.	Informasi mengenai pemaparan/rincian/analisa nilai sebuah pos pada Laporan Operasional, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, serta Laporan Perubahan Ekuitas pada bagian ini. Di dalamnya termasuk pemaparan informasi yang oleh SAP diwajibkan serta dianjurkan, juga istilah-istilah lainnya yang dibutuhkan supaya pemaparan laporan keuangan wajar.	Sudah sesuai

5. Kesimpulan

Berpatokan pada PP No. 71 Tahun 2010 yang menjadi landasan pembuatan laporan keuangan, terdapat tujuh unsur di dalamnya antara lain, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Tahun Anggaran 2021 menyajikan laporan keuangan hanya dengan lima bagian diantaranya, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B telah menyajikan kelima unsur laporan keuangan tahun 2021 sesuai ketentuan PP No. 71 Tahun 2010. Hanya saja dalam laporannya, Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B tidak memaparkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih juga Laporan Arus Kas. Kedua komponen itu tak disertakan dikarenakan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B tidak memiliki fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah ataupun Bendahara Umum Negara maka tidak membuat laporan keuangan konsolidasi. Pada Laporan Realisasi Anggaran terdapat pos-pos yang belum

tercantum diantaranya adalah transfer, pendanaan, defisit(surplus)-LRA, serta kelebihan ataupun kekurangan pembiayaan anggaran.

Daftar Pustaka

- Barus, Andi Elkana. 2021. "ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO." *ANALISIS PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO* 11(JURNAL NERACA AGUNG):61-69.
- Desipradani, Gita, and Zeni Rusmawati. 2017. "Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010." *Jurnal Balance* XIV(2):14-28.
- Dharmawati, Tuti, Inthanah, and Putri Harum Sari Trisila. 2018. "Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Operasional BPKAD Kabupaten Konawe." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume III* 3(1):1-13.
- Hartati, Sri, Edduar Hendri, Edduar Hendri, Emma Lilianti, and Emma Lilianti. 2020. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 2(2):167. doi: 10.31851/jmediasi.v2i2.5040.
- Lasabuda, Anastasya A., Jenny Morasa, and Victorina Z. Tirayoh. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15(2):167. doi: 10.32400/gc.15.2.28068.2020.
- Maryono, and Lamaya Fauziyah. 2021. "Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Di Pengadilan Tinggi Agama Kupang." *Jurnal Monex* 10:224-30.
- Mumu, Praisya, Lintje Kalangi, and Kapojos Peter M. 2023. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 7(3):105-14.
- Peraturan Pemerintah RI. 2010. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)."
- Prayogo, Youdhi, Atar Satria Fikri, Khairunnisa Puti Nandini, Ekonomi Syariah, Sulthan Thaha, and Saifudin Jambi. 2023. "Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah." 3(2):44-58.
- Rombbunga, Frenly, David P. E. Saerang, and Novi Swandari Budirso. 2018. "EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BITUNG BERDASARKAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(71):295-301.
- Sadat, Anwar. 2020. *GOVERNMENTAL ACCOUNTING (AKUNTANSI PEMERINTAHAN)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sanosi, Sayidah Maryam. 2021. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng." *Skripsi AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS*.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*. edited by Mona. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zamzami, Faiz, and Nabella Duta Nusa. 2017. *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: UGM PRESS.